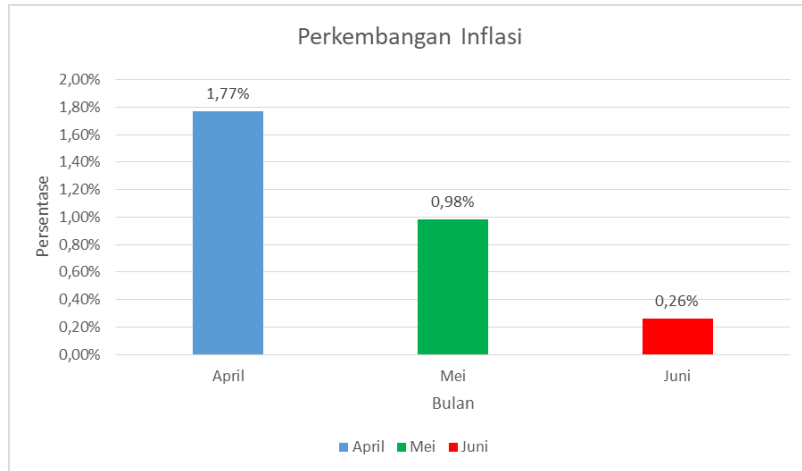


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indek inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2025 adalah sebagai berikut :



Pada April 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,38 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,77. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2,71 % dengan IHK sebesar 111,67 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 1,07 % dengan IHK sebesar 110,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,63 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,71 %; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34 %; kelompok kesehatan sebesar 2,30 %; kelompok transportasi sebesar 2,14 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,73 %; kelompok pendidikan sebesar 2,98 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,98 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,57 %. Sementara itu, kelompok yang mengalami penurunan harga adalah dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,97 %.

Pada Mei 2025 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,85 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,69. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 1,23 % dengan IHK sebesar 108,25 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,16 % dengan IHK sebesar 109,05.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,43 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,50 %; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38 %; kelompok kesehatan sebesar 2,31 %; kelompok transportasi sebesar 2,47 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,74 %; kelompok pendidikan sebesar 2,98 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,24 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48 %. Sementara itu, kelompok yang mengalami penurunan harga

adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,85 % dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 %. Secara *month to month* (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Mei 2025 mengalami deflasi sebesar 0,98 %. Hingga Mei 2025, inflasi *year to date* (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,67 %.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Juni 2025 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih mengalami deflasi mencapai 0,26 persen, meski tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai 0,98 persen, komoditas utama pendorong deflasi pada Juni 2025 yakni, penurunan harga cabai merah, ayam ras hingga bawang putih di sejumlah daerah di Sumbar. Kepala BPS Sumbar, menjelaskan, secara nasional laju inflasi di Sumbar pada Juni 2025 masuk dalam kategori masih terkendali. Ia menuturkan, meski mengalami deflasi, namun jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, Sumbar mengalami inflasi sebesar 1,41 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sumatera Barat mengalami inflasi tertinggi Nasional pada April 2025 disebabkan berakhirnya periode diskon 50 persen pada Januari-April 2025, tingginya konsumsi cabai merah serta pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran belanja dan kegiatan pemerintah daerah turut berimbas pada kenaikan inflasi di Sumbar. Salah satu penyebab utama adalah kenaikan tarif listrik. Kalau dilihat penggunaannya di Sumbar pascabayar sangat besar, hampir dua pertiga sementara, pascabayar itu tersisa hanya tinggal sepertiganya saja, lalu yang kedua karena masih dalam suasana lebaran, tingkat konsumsi cabai masyarakat juga tinggi, kemudian dampak efisiensi anggaran pemerintah sejak awal tahun saya kira mulai terasa.

Dalam beberapa waktu ke depan, arah kebijakan pengendalian inflasi diprediksi akan tetap fokus pada kestabilan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadi penting untuk menghindari tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kuartal mendatang, terutama menjelang musim kemarau dan potensi gangguan produksi di sektor pertanian. Inflasi bulanan yang relatif rendah ini diharapkan dapat memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pengambil kebijakan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga.

Berkat kerja sama pemerintah dan TPID, inflasi di Sumbar berhasil ditekan. Bahkan karena menjadi yang terbaik di seluruh tingkatan nasional, kita mendapat apresiasi berulang dari Pemerintah Pusat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada tahun 2025 beberapa kegiatan rutin tetap dilakukan diantaranya, Gerakan Pasar Murah, Pemantauan harga ke Pasar-pasar Nagari, Pengecekan stok Beras ke BULOG, Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan Pelaporan harga bahan pokok.
2. Pemantauan dan Pelaporan harga setiap hari melalui SP2KP dan Web Panel Harga dan pelaporan berkala ke Irjen Mendagri oleh OPD Terkait
3. Lanjutan Bantuan Pangan dari Pemerintah Daerah sumber dana APBD Kab Lima Puluh Kota kepada 54.000 KK Miskin desil 1-4 berdasarkan Data P3KE.
4. Update harga komoditi bahan pokok setiap hari di aplikasi informasi harga barang pokok dengan alamat <https://dev-inflasi.limapuluhkotakab.go.id/>.
5. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 setiap minggunya

bersama Kementrian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting.

6. Kunjungan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota koordinasi terkait ketahanan pangan
7. Dinas Pangan, Pemantaun dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan, 22 April 2025
8. Dinas Pangan, Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru ke Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Rangka Koordinasi Terkait Ketahanan Pangan, tanggal 29 April 2025
9. Dinas Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) tanggal 5 Juni 2025
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pengambilan Ubinan Demplot Jagung A1, pada tanggal 5 Juni 2025
11. Dinas Pangan Survei Lokasi untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), tanggal 6 Mei 2025
12. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pemeriksaan Tertib Administrasi Kios Dan Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi, tanggal 22 Mei 2025
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Monitoring Dan Meninjau Dampak Sawah Pokok Murah Di Lahan Kelompok Tani Kubu Indah, tanggal 22 Mei 2025
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kegiatan panen bersama demplot jagung varietas Thunder, tanggal 22 Mei 2025.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Gerakan pangan murah membuka akses pangan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga membantu mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengawasan dan pemantauan ke pasar yang dilakukan menjaga kepatuhan pedagang terhadap regulasi harga, mengurangi praktik penimbunan, dan memastikan ketersediaan stok pangan.
3. Kerjasama dengan daerah luar menghasilkan dampak positif yang mana meningkatkan ketersediaan pangan, mengurangi ketergantungan pada satu sumber, dan membantu stabilisasi harga.
4. Penanaman jagung mendukung produksi pangan domestic yang stabil, mengurangi ketergantungan impor, dan membantu stabilisasi harga.
5. Koordinasi dengan stakeholder meningkatkan efektivitas kebijakan, memastikan keselarasan antar-pemangku kepentingan, dan memfasilitasi penyelesaian masalah secara komprehensif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan dari TW I- TW IV.
3. Memantau harga bahan pokok dan barang strategis di pasar lokal agar harga kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan distribusi barang
5. Untuk mencegah inflasi, dapat dilakukan berbagai antisipasi dan percepatan, seperti: Memantau stok bahan pokok, Melakukan kerjasama dengan satgas pangan, Melakukan operasi pasar, Melakukan sinergi dengan penegak hukum.
6. Melakukan inspeksi mendadak atau sidak pasar terkait harga dan pasokan barang.

Melakukan Gerakan Pasar, intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), hingga pendistribusian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan stok pangan komersil oleh Bulog.